Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman
JIPKIS
Vol. 5, No. 1, April, 2025 hal. 153-166
Journal Page is available to https://jipkis.stai-dq.org/index.php/home

KETERJANGKAUAN UANG KULIAH TUNGGAL TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI DAN PENGELUARAN PER KAPITA: STUDI DESKRIPTIF PADA 20 PERGURUAN TINGGI NEGERI JALUR SNBP 2024

Supatmin[1], Eko Cahyadi[2]
[1,2]Universitas Pamulang
Email: dosen01767@unpam.ac.id

Abstrak

Latar belakang: Uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) ditetapkan dalam rupiah nominal yang sama untuk calon mahasiswa dari provinsi mana pun, padahal upah dan pengeluaran rumah tangga sangat berbeda antardaerah. Ukuran keterjangkauan UKT terhadap daya bayar setempat belum banyak dilaporkan. Tujuan: Mengukur keterjangkauan UKT terhadap upah minimum provinsi (UMP) dan rata-rata pengeluaran per kapita, serta memeriksa apakah besaran UKT mengikuti daya bayar di daerah lokasi kampus. Metode: Studi deskriptif potong lintang pada 20 PTN di sembilan provinsi. UKT kelompok tertinggi jalur SNBP 2024 dihimpun dari laporan media yang mengutip laman resmi kampus, UMP 2024 dari daftar penetapan gubernur, dan pengeluaran per kapita sebulan 2024 dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Keterjangkauan dinyatakan sebagai jumlah bulan UMP atau pengeluaran per kapita yang setara satu kali UKT semester. Analisis sensitivitas memakai upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan pengeluaran per kapita kabupaten/kota lokasi kampus. Uji Mann–Whitney, korelasi Spearman, dan regresi log-log dengan galat baku HC3 dipakai untuk perbandingan. Hasil: Satu kali UKT tertinggi setara median 9,0 bulan UMP (rentang 2,6–15,7) dan 15,1 bulan pengeluaran per kapita provinsi (5,5–25,2). Pada 16 dari 20 PTN, UKT tertinggi melebihi UMP enam bulan penuh. Beban terhadap UMP lebih berat di Jawa (median 11,5 bulan) daripada di luar Jawa (5,8 bulan; $p = 0{,}018$), tetapi perbedaan itu hilang bila UMK kota kampus dipakai (6,8 dan 5,6 bulan; $p = 0{,}67$). Besaran UKT tidak berkaitan dengan UMP (elastisitas $-0{,}49$; $p = 0{,}34$) maupun pengeluaran per kapita ($-0{,}52$; $p = 0{,}35$). UKT kelompok 1 dan 2 hanya setara 2,4–8,2% UMP satu semester. Kesimpulan: UKT kelompok tertinggi berada jauh di atas kemampuan rumah tangga berpendapatan setara upah minimum, dan tingkat bebannya bergantung pada daerah karena tarif tidak disesuaikan dengan daya bayar setempat. Ketepatan penempatan mahasiswa pada kelompok UKT lebih menentukan keterjangkauan daripada tarif tertinggi itu sendiri. Temuan ini bersifat deskriptif dan memerlukan data sebaran mahasiswa per kelompok UKT.

Kata kunci: uang kuliah tunggal; keterjangkauan biaya kuliah; upah minimum provinsi; pengeluaran per kapita; perguruan tinggi negeri

Abstract

Background: Indonesia's single tuition fee (UKT) at state universities is set in nominal rupiah regardless of the student's province, while wages and household spending vary widely across regions. Evidence on UKT affordability relative to local ability to pay is limited. Objective: To measure UKT affordability against the provincial minimum wage (UMP) and average per capita expenditure, and to test whether UKT levels follow local ability to pay. Methods: Descriptive cross-sectional study of 20 state universities in nine provinces. The highest UKT group for the 2024 SNBP admission track was compiled from media reports citing official campus pages, the 2024 UMP from governors' decrees as reported, and 2024 monthly per capita expenditure from the BPS National Socioeconomic Survey (Susenas). Affordability is expressed as the number of

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

months of UMP or per capita expenditure equal to one semester's UKT. Sensitivity analyses use district minimum wages (UMK) and district per capita expenditure where the campus is located. Mann–Whitney tests, Spearman correlation and log-log OLS with HC3 errors were used. Results: One semester of the highest UKT equalled a median 9.0 months of UMP (range 2.6–15.7) and 15.1 months of provincial per capita expenditure (5.5–25.2). At 16 of 20 universities it exceeded six full months of UMP. The burden relative to UMP was heavier on Java (median 11.5 months) than elsewhere (5.8; $p = 0.018$), but the gap disappeared with campus-district UMK (6.8 vs 5.6; $p = 0.67$). UKT was unrelated to UMP (elasticity −0.49; $p = 0.34$) and per capita expenditure (−0.52; $p = 0.35$). UKT groups 1 and 2 equalled only 2.4–8.2% of a semester's UMP. Conclusion: The top UKT group is far beyond the means of minimum-wage households, and the burden depends on location because fees are not adjusted to local ability to pay. Accurate placement of students into UKT groups matters more for affordability than the top fee itself. Findings are descriptive and need data on the distribution of students across UKT groups.
Keywords: single tuition fee; college affordability; minimum wage; per capita expenditure; state universities

PENDAHULUAN

Mahasiswa program sarjana di perguruan tinggi negeri (PTN) Indonesia membayar uang kuliah tunggal (UKT) setiap semester. UKT dibagi ke dalam beberapa kelompok menurut kemampuan ekonomi keluarga. Pemerintah menetapkan kelompok 1 sebesar Rp500 ribu dan kelompok 2 sebesar Rp1 juta, sedangkan kelompok di atasnya ditetapkan oleh masing-masing PTN dalam kerangka standar satuan biaya operasional yang diatur Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 (Nancy, 2024). Pada 2024, rencana kenaikan UKT di sejumlah PTN memicu protes mahasiswa, dan pemerintah membatalkan kenaikan UKT tahun akademik 2024/2025 (Yulianti, 2025). Kajian hukum menilai UKT yang tinggi berisiko mengabaikan tanggung jawab konstitusional negara atas akses pendidikan (Setiawan, 2024).

Perdebatan itu jarang disertai ukuran keterjangkauan yang eksplisit. UKT ditetapkan dalam rupiah nominal, dan satu nilai berlaku untuk calon mahasiswa dari mana pun. Sementara itu, daya bayar rumah tangga sangat berbeda antardaerah. Upah minimum provinsi (UMP) 2024 berkisar dari sekitar Rp2,04 juta di Jawa Tengah sampai Rp5,07 juta di DKI Jakarta (Santika, 2023), dan rata-rata pengeluaran per kapita nasional pada Maret 2024 adalah Rp1,50 juta sebulan (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Akibatnya, UKT yang sama dapat berarti beban yang sangat berbeda bagi keluarga di provinsi yang berbeda, dan PTN di provinsi berupah rendah dapat memungut UKT yang setara atau lebih tinggi daripada PTN di provinsi berupah tinggi.

Literatur pembiayaan pendidikan tinggi mengukur keterjangkauan sebagai perbandingan antara harga kuliah dan sumber daya keluarga. Hill et al. (2005) menghitung harga bersih kuliah sebagai persentase pendapatan keluarga menurut kuintil pendapatan, dan Liu et al. (2021) menilai keterjangkauan biaya kuliah PTN di Tiongkok dengan rasio biaya kuliah terhadap pendapatan disposabel per kapita menurut wilayah. Rasio seperti ini penting karena permintaan pendidikan tinggi responsif terhadap harga, terutama pada mahasiswa berpendapatan rendah (Heller, 1997), dan bantuan biaya terbukti menaikkan partisipasi kuliah (Dynarski, 2003). Di negara yang menerapkan pembagian biaya antara negara dan mahasiswa, tarif yang tidak disertai bantuan memadai dapat mempersempit akses (Barr, 2004; Johnstone, 2004; Marcucci & Johnstone, 2007).

Di Indonesia, akses pendidikan tinggi masih timpang menurut pendapatan. Pendapatan keluarga per anggota rumah tangga dan pendidikan kepala rumah tangga berkaitan positif dengan peluang melanjutkan ke program sarjana (Ogawa & Iimura, 2010), pemerataan akses masih menjadi tantangan utama pendidikan tinggi Indonesia (Purnastuti & Izzaty, 2016),

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.281

sebagian besar mahasiswa PTN terkemuka berasal dari kelompok terkaya, dan kebijakan afirmasi untuk mahasiswa berstatus sosial ekonomi rendah terhambat oleh anggaran dan mekanisme pelaksanaan (Fadhil & Sabic-El-Rayess, 2021). Namun studi yang membandingkan besaran UKT dengan ukuran daya bayar resmi, seperti UMP dan pengeluaran per kapita hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), masih sulit ditemukan.

Artikel ini mengisi sebagian celah itu dengan tiga tujuan: (1) mengukur berapa bulan UMP dan pengeluaran per kapita yang setara dengan satu kali UKT pada 20 PTN, (2) membandingkan beban itu antara PTN di Jawa dan di luar Jawa, serta antara tolok ukur provinsi dan kabupaten/kota, dan (3) memeriksa apakah besaran UKT mengikuti daya bayar di daerah lokasi kampus. Studi ini bersifat deskriptif dan tidak menilai apakah mahasiswa tertentu mampu membayar UKT-nya.

METODE

Rancangan dan penyimpangan dari rancangan awal. Studi ini deskriptif potong lintang. Rancangan ideal adalah membandingkan seluruh sebaran UKT per program studi dan per kelompok, beserta jumlah mahasiswa di setiap kelompok, dengan daya bayar keluarga. Data seperti itu tidak tersedia secara terbuka, dan portal PDDikti, laman BPS, serta laman resmi kampus tidak dapat diakses dari lingkungan kerja penulis (permintaan ditolak oleh pembatas jaringan). Oleh karena itu, (a) UKT yang dianalisis adalah UKT kelompok tertinggi dan dua kelompok terendah yang ditetapkan nasional, bukan rata-rata UKT; (b) data UKT diambil dari laporan media yang mengutip laman resmi kampus; dan (c) data pengeluaran per kapita diambil dari sajian ulang data Susenas oleh Databoks, kecuali angka nasional yang diambil langsung dari publikasi BPS. Judul memuat kata "studi deskriptif" untuk menandai batas itu.

Data UKT. UKT kelompok tertinggi jalur SNBP 2024 untuk 20 PTN diambil dari tabel yang dihimpun Nancy (2024) dan sama dengan data yang dipakai pada studi sebelumnya tentang PTN berbadan hukum. UKT dibayar per semester. Program studi pemilik UKT tertinggi tidak dirinci oleh sumber, tetapi umumnya adalah kedokteran. Dua PTN (Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang) memiliki angka yang berbeda jauh dengan data UKT kedokteran dari Yulianti (2024), dan angka Universitas Jenderal Soedirman berbeda dengan sumber lain (Dealls, tanpa tahun). Ketiganya diuji dalam analisis sensitivitas. Untuk kelompok terendah, dipakai UKT kelompok 1 (Rp500 ribu) dan kelompok 2 (Rp1 juta) yang berlaku nasional (Nancy, 2024).

Data upah minimum. UMP 2024 sembilan provinsi lokasi PTN diambil dari daftar penetapan UMP 2024 di 38 provinsi (Santika, 2023) dan dicocokkan dengan daftar Bisnis.com (Nurdifa, 2024); kedua sumber sama setelah pembulatan. Untuk analisis sensitivitas, upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tempat kampus utama berada diambil dari Prayoga (2023) dan, untuk Kota Makassar, dari Cermati (2024). Provinsi Aceh tidak menetapkan UMK terpisah untuk Kota Banda Aceh, sehingga UMP Aceh dipakai. Lokasi kampus utama ditetapkan sebagai berikut: UI di Kota Depok, IPB di Kabupaten Bogor, Unpad di Kabupaten Sumedang (Jatinangor), UGM dan UNY di Kabupaten Sleman, dan Unud di Kabupaten Badung (Jimbaran).

Data pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan (makanan dan bukan makanan) tahun 2024 untuk sembilan provinsi dan 15 kabupaten/kota diambil dari hasil Susenas BPS sebagaimana disajikan oleh Databoks (Darmawan, 2026; daftar laman pada Tabel L1). Angka nasional Maret 2024 (Rp1.500.556) diambil dari ringkasan eksekutif BPS (2024). Pengeluaran per kapita mengukur konsumsi rata-rata satu orang, bukan pendapatan rumah tangga, dan dipakai karena merupakan ukuran

CC BY NC SA

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

kesejahteraan rumah tangga yang tersedia seragam untuk semua daerah.

Ukuran keterjangkauan. Indikator utama adalah beban bulan, yaitu UKT satu semester dibagi UMP sebulan (bulan UMP) atau dibagi pengeluaran per kapita sebulan (bulan pengeluaran). Karena satu semester kira-kira enam bulan, nilai di atas 6 berarti satu kali UKT lebih besar daripada seluruh UMP atau seluruh pengeluaran per kapita selama semester itu. Indikator ini mengikuti logika rasio biaya kuliah terhadap pendapatan atau pengeluaran per kapita (Hill et al., 2005; Liu et al., 2021). Tidak ada ambang resmi keterjangkauan UKT di Indonesia, sehingga ambang enam bulan dipakai sebagai patokan ilustratif, bukan batas normatif. Sebagai ilustrasi tingkat rumah tangga, dihitung pula porsi UKT terhadap pengeluaran semester rumah tangga empat orang, yaitu empat kali pengeluaran per kapita provinsi dikali enam bulan. Ukuran rumah tangga empat orang adalah asumsi penulis.

Analisis. Indikator diringkas dengan median dan rentang. Perbedaan beban antara PTN di Jawa (15 PTN) dan di luar Jawa (5 PTN) diuji dengan uji Mann–Whitney dua arah. Hubungan antara besaran UKT dan daya bayar diuji dengan korelasi Spearman dan regresi OLS ln(UKT) terhadap ln(UMP), ln(UMK), atau ln(pengeluaran per kapita), dengan galat baku HC3 untuk sampel kecil (Long & Ervin, 2000). Koefisien regresi ini adalah elastisitas: nilai 1 berarti UKT naik sebanding dengan daya bayar, sehingga bebannya sama di semua daerah, sedangkan nilai 0 berarti UKT tidak mengikuti daya bayar. Analisis sensitivitas (a) mengganti tolok ukur provinsi dengan tolok ukur kabupaten/kota kampus, (b) mengganti UKT Universitas Jenderal Soedirman dengan Rp17 juta, (c) mengeluarkan UB dan UM, (d) memakai UKT kedokteran detikEdu untuk UB dan UM, dan (e) menempatkan Unpad di Kota Bandung. Semua analisis dijalankan dengan Python (pandas, SciPy, dan statsmodels), dan data serta skrip tersedia sebagai berkas pendamping.

HASIL

Daya bayar di sembilan provinsi. UMP 2024 di sembilan provinsi berkisar dari Rp2.036.947 (Jawa Tengah) sampai Rp3.460.672 (Aceh), atau 1,70 kali lipat. Empat provinsi di Jawa memiliki UMP terendah, semuanya di bawah Rp2,2 juta. Pengeluaran per kapita sebulan berkisar dari Rp1.264.733 (Aceh) sampai Rp2.042.791 (Kalimantan Timur). Kedua ukuran tidak sejalan (Spearman $\rho = -0{,}13$ antarprovinsi): UMP Aceh dan Sulawesi Selatan sekitar 2,7 kali pengeluaran per kapita, sedangkan UMP DI Yogyakarta dan Jawa Barat hanya sekitar 1,2–1,3 kali (Tabel 3). Karena itu kesimpulan tentang keterjangkauan dapat berbeda menurut tolok ukur yang dipakai.

Beban UKT tertinggi. Tabel 1 dan Gambar 1 menunjukkan beban UKT kelompok tertinggi pada setiap PTN. Satu kali UKT tertinggi setara median 9,0 bulan UMP, dengan rentang 2,6 bulan (Universitas Riau) sampai 15,7 bulan (Universitas Negeri Semarang). Pada 16 dari 20 PTN, satu kali UKT tertinggi melebihi UMP enam bulan penuh. Hanya Universitas Riau, Universitas Syiah Kuala, ITS, dan Universitas Hasanuddin yang berada di bawah ambang itu. Terhadap pengeluaran per kapita provinsi, bebannya lebih besar: median 15,1 bulan, dengan rentang 5,5 sampai 25,2 bulan, dan 19 dari 20 PTN melebihi enam bulan. Bila dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga empat orang, satu kali UKT tertinggi setara median 63% pengeluaran rumah tangga selama satu semester, dan pada UNNES mencapai 105%.

Tabel 1. UKT kelompok tertinggi SNBP 2024 dan bebannya terhadap upah minimum dan pengeluaran per kapita

PTN	Provinsi	UKT (Rp juta)	UMP (Rp juta)	Bulan UMP	Pengeluaran/kapita prov. (Rp	Bulan pengeluaran	Kab/kota kampus	UMK (Rp juta)	Bulan UMK	Bulan pengeluaran

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.281

		ta)	**ta)**		**juta)**	**aran prov.**	**mpus**	**ta)**		**aran kab/kota**
UNNES	Jawa Tengah	32,00	2,04	15,7	1,27	25,2	Kota Semarang	3,24	9,9	12,9
UB	Jawa Timur	33,50	2,17	15,5	1,36	24,7	Kota Malang	3,31	10,1	15,2
UNESA	Jawa Timur	32,00	2,17	14,8	1,36	23,6	Kota Surabaya	4,73	6,8	11,3
UNS	Jawa Tengah	30,00	2,04	14,7	1,27	23,6	Kota Surakarta	2,27	13,2	15,7
UNS	Jawa	30,	2,0	14,	1,27	23,6	Kab.	2,2	13,	20,5
OED	Tengah	00	4	7			Banyumas	0	7	
UGM	DI Yogyakarta	30,00	2,13	14,1	1,76	17,1	Kab. Sleman	2,32	13,0	10,7
UNPAD	Jawa Barat	24,00	2,06	11,7	1,63	14,7	Kab. Sumedang	3,50	6,8	16,7
UNAIR	Jawa Timur	25,00	2,17	11,5	1,36	18,4	Kota Surabaya	4,73	5,3	8,8
UNDIP	Jawa Tengah	22,00	2,04	10,8	1,27	17,3	Kota Semarang	3,24	6,8	8,9
UI	Jawa	20,	2,0	9,7	1,63	12,2	Kota	4,8	4,1	6,6

CC BY NC SA

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

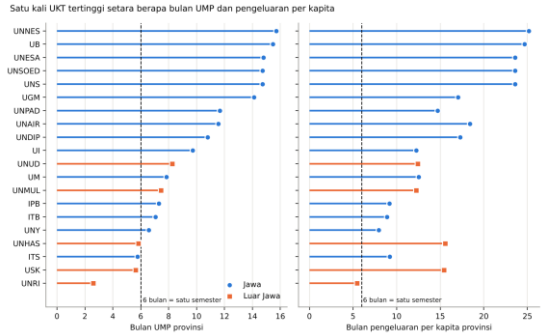
	Barat	00	6				Depok	8		
UNUD	Bali	23,24	2,81	8,3	1,87	12,4	Kab. Badung	3,32	7,0	8,3
UM	Jawa Timur	17,00	2,17	7,9	1,36	12,5	Kota Malang	3,31	5,1	7,7
UNMUL	Kalimantan Timur	25,00	3,36	7,4	2,04	12,2	Kota Samarinda	3,50	7,1	9,9
IPB	Jawa Barat	15,00	2,06	7,3	1,63	9,2	Kab. Bogor	4,58	3,3	10,4
ITB	Jawa Barat	14,50	2,06	7,0	1,63	8,9	Kota Bandung	4,21	3,4	5,5
UNY	DI Yogyakarta	14,00	2,13	6,6	1,76	8,0	Kab. Sleman	2,32	6,0	5,0
UNHAS	Sulawesi Selatan	20,00	3,43	5,8	1,28	15,6	Kota Makassar	3,64	5,5	10,2
ITS	Jawa Timur	12,50	2,17	5,8	1,36	9,2	Kota Surabaya	4,73	2,6	4,4
USK	Aceh	19,50	3,46	5,6	1,26	15,4	Kota Banda Aceh	3,46	5,6	7,3
UNRI	Riau	8,55	3,29	2,6	1,56	5,5	Kota Pekanb	3,45	2,5	3,6

CC BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.281

							ar u			

Catatan: bulan UMP = UKT satu semester dibagi UMP sebulan; definisi serupa untuk kolom lain. Nilai di atas 6 berarti satu kali UKT melebihi seluruh upah atau pengeluaran per kapita selama satu semester. UKT dari Nancy (2024); UMP dari Santika (2023); UMK dari Prayoga (2023) dan Cermati (2024); pengeluaran per kapita Susenas 2024 dari Darmawan (2026). Kota Banda Aceh memakai UMP Aceh.



Gambar 1. Jumlah bulan UMP (kiri) dan pengeluaran per kapita provinsi (kanan) yang setara satu kali UKT kelompok tertinggi. Garis putus-putus menandai enam bulan (satu semester). Sumber: Nancy (2024), Santika (2023), Darmawan (2026), diolah.

Perbandingan Jawa dan luar Jawa. UKT tertinggi PTN di Jawa tidak berbeda nyata dari PTN di luar Jawa (median Rp24,0 juta dan Rp20,0 juta; Mann–Whitney p = 0,34). Namun karena UMP di Jawa jauh lebih rendah, beban terhadap UMP di Jawa hampir dua kali lipat: median 11,5 bulan berbanding 5,8 bulan (p = 0,018). Terhadap pengeluaran per kapita provinsi, selisihnya lebih kecil dan tidak signifikan (17,1 berbanding 12,4 bulan; p = 0,22). Tabel 2 meringkas hasil uji.

Tabel 2. Ringkasan beban UKT tertinggi menurut letak PTN

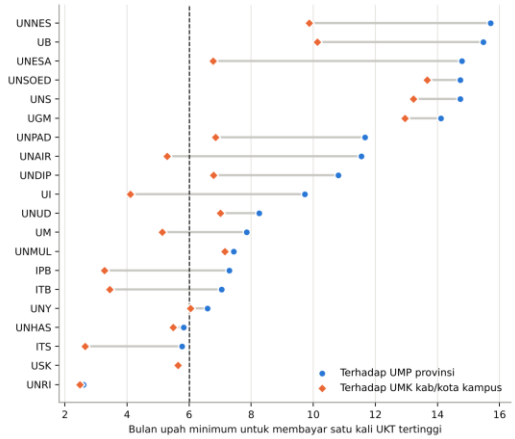
Indikator	Semua PTN, median (rentang)	Jawa (n = 15), median	Luar Jawa (n = 5), median	U Mann–Whitney	p
UKT tertinggi (Rp juta)	22,6 (8,6–33,5)	24,0	20,0	49	0,336
Bulan UMP provinsi	9,0 (2,6–15,7)	11,5	5,8	65	0,018
Bulan pengeluaran per kapita provinsi	15,1 (5,5–25,2)	17,1	12,4	52	0,222
Bulan UMK kab/kota kampus	6,4 (2,5–13,7)	6,8	5,6	43	0,672
Bulan pengeluaran per kapita kab/kota	9,4 (3,6–20,5)	10,4	8,3	52	0,230

Catatan: uji Mann–Whitney dua arah.

Tolok ukur provinsi dan kabupaten/kota. Gambar 2 memperlihatkan bahwa pilihan tolok ukur sangat memengaruhi hasil di Jawa. UMK di kota tempat kampus berada di Jawa jauh lebih tinggi daripada UMP, misalnya Rp4,73 juta di Kota Surabaya dan Rp4,88 juta di Kota Depok, sementara UMP Jawa Timur dan Jawa Barat sekitar Rp2,1 juta. Dengan tolok ukur UMK, median beban turun menjadi 6,4 bulan, dan jumlah PTN dengan beban di atas enam bulan turun dari 16 menjadi 11. Selisih Jawa dan luar Jawa hilang (6,8 berbanding 5,6 bulan; p = 0,67). Hal yang sama terjadi dengan pengeluaran per kapita kabupaten/kota (median 9,4 bulan; selisih Jawa dan luar Jawa p = 0,23). Penurunan terbesar terjadi pada PTN di kota metropolitan seperti UI, ITS, UNAIR, UNESA, IPB, dan ITB. Sebaliknya, beban

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

pada UNS, UNSOED, dan UGM tetap sekitar 13–14 bulan karena UMK Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Sleman hanya sedikit di atas UMP.



Gambar 2. Beban UKT kelompok tertinggi terhadap UMP provinsi dan UMK kabupaten/kota lokasi kampus. Garis abu-abu menunjukkan perubahan akibat pergantian tolok ukur. Pada USK, UMK sama dengan UMP. Sumber: Nancy (2024), Santika (2023), Prayoga (2023), Cermati (2024), diolah.

Apakah UKT mengikuti daya bayar? Besaran UKT tertinggi tidak berkaitan positif dengan ukuran daya bayar mana pun. Korelasi Spearman antara UKT dan UMP adalah −0,25 (p = 0,29), dengan pengeluaran per kapita provinsi −0,22 (p = 0,35), dengan UMK −0,29 (p = 0,21), dan dengan pengeluaran per kapita kabupaten/kota −0,10 (p = 0,69). Elastisitas UKT terhadap UMP adalah −0,49 (galat baku 0,51; p = 0,34; selang kepercayaan 95% −1,49 sampai 0,51), dan terhadap pengeluaran per kapita provinsi −0,52 (galat baku 0,56; p = 0,35; −1,61 sampai 0,57). Selang kepercayaan kedua elastisitas tidak mencakup nilai 1, yang berarti pada sampel ini tidak ada bukti bahwa UKT tertinggi naik sebanding dengan daya bayar daerah. Karena sampel kecil, selang itu masih lebar dan tidak dapat membedakan antara tidak ada hubungan dan hubungan negatif sedang.

UKT kelompok terendah. Berbeda dengan kelompok tertinggi, UKT kelompok 1 dan 2 relatif ringan terhadap upah minimum (Tabel 3 dan Gambar 3). UKT kelompok 1 setara 2,4% (Aceh) sampai 4,1% (Jawa Tengah) UMP selama satu semester, dan UKT kelompok 2 setara 4,8% sampai 8,2%. Terhadap pengeluaran per kapita, kelompok 1 setara 4,1–6,6% dan kelompok 2 setara 8,2–13,2% pengeluaran satu orang selama satu semester. Karena nilainya seragam secara nasional, beban relatifnya di Jawa sekitar 1,6 kali beban di Aceh atau Sulawesi Selatan.

Tabel 3. Daya bayar provinsi dan beban UKT kelompok 1 dan 2

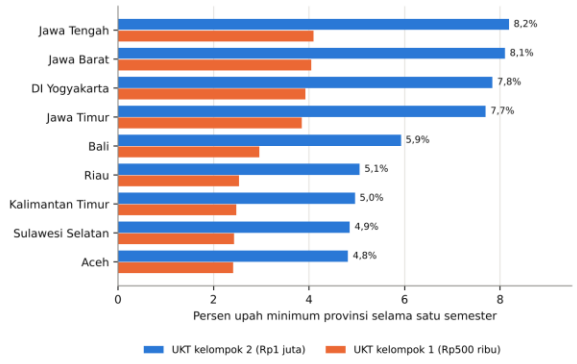
Provinsi	UMP 2024 (Rp)	Pengeluaran per kapita sebulan 2024 (Rp)	UMP/pengeluaran	UKT 1 (% UMP semester)	UKT 2 (% UMP semester)	UKT 1 (% pengeluaran semester)	UKT 2 (% pengeluaran semester)
Jawa Tengah	2.036.947	1.271.678	1,60	4,1	8,2	6,6	13,1
Jawa Barat	2.057.495	1.633.032	1,26	4,1	8,1	5,1	10,2
DI Yogyakarta	2.125.898	1.758.865	1,21	3,9	7,8	4,7	9,5
Jawa Timur	2.165.244	1.356.943	1,60	3,8	7,7	6,1	12,3
Bali	2.813.	1.872.760	1,50	3,0	5,9	4,4	8,9

CC BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.281

	672						
Riau	3.294.625	1.563.165	2,11	2,5	5,1	5,3	10,7
Kalimantan Timur	3.360.858	2.042.791	1,65	2,5	5,0	4,1	8,2
Sulawesi Selatan	3.434.298	1.283.081	2,68	2,4	4,9	6,5	13,0
Aceh	3.460.672	1.264.733	2,74	2,4	4,8	6,6	13,2

Catatan: UKT kelompok 1 = Rp500 ribu dan kelompok 2 = Rp1 juta per semester. Persentase dihitung terhadap enam kali nilai bulanan. Pengeluaran per kapita nasional Maret 2024 adalah Rp1.500.556 (BPS, 2024).



Gambar 3. UKT kelompok 1 dan 2 sebagai persentase UMP selama satu semester menurut provinsi. Sumber: Nancy (2024), Santika (2023), diolah.

Analisis sensitivitas. Kesimpulan utama tidak berubah dalam analisis sensitivitas. Bila UKT Universitas Jenderal Soedirman diganti Rp17 juta, median beban terhadap UMP menjadi 8,3 bulan dan selisih Jawa dan luar Jawa tetap signifikan (p = 0,015). Bila UB dan UM dikeluarkan, median tetap 9,0 bulan (p = 0,023). Bila UKT UB dan UM diganti dengan angka kedokteran dari detikEdu, median menjadi 10,3 bulan (p = 0,014). Bila Unpad ditempatkan di Kota Bandung, beban terhadap UMK turun dari 6,8 menjadi 5,7 bulan dan beban terhadap pengeluaran per kapita kabupaten/kota turun dari 16,7 menjadi 9,1 bulan, sehingga hasil Unpad bergantung pada pilihan lokasi kampus.

PEMBAHASAN

Temuan pertama adalah bahwa UKT kelompok tertinggi jauh melampaui kemampuan keluarga yang hidup dari upah minimum. Pada median PTN, satu kali UKT tertinggi setara sembilan bulan UMP, sedangkan semesternya hanya enam bulan. Artinya, keluarga dengan satu pencari nafkah berpenghasilan UMP tidak akan mampu membayar UKT tertinggi bahkan bila seluruh upahnya dipakai untuk kuliah. Temuan ini tidak berarti UKT tertinggi tidak adil, karena sistem UKT memang dirancang sebagai subsidi silang: kelompok tertinggi ditujukan bagi keluarga yang mampu, dan kelompok 1 dan 2 bagi keluarga miskin. Pada kelompok 1 dan 2, beban terhadap UMP hanya 2–8%, jauh di bawah beban kelompok tertinggi. Karena itu keterjangkauan sistem UKT lebih ditentukan oleh ketepatan penempatan mahasiswa ke kelompok daripada oleh besaran tarif tertinggi. Bila mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah ditempatkan di kelompok tinggi, atau kuota kelompok rendah terbatas, beban yang ditunjukkan kelompok tertinggi dapat menimpa keluarga yang tidak mampu. Studi ini tidak dapat mengukur seberapa sering hal itu terjadi, tetapi kebijakan afirmasi diketahui belum cukup menjangkau mahasiswa miskin (Fadhil & Sabic-El-Rayess, 2021).

Temuan kedua adalah bahwa besaran UKT tidak mengikuti daya bayar daerah. Elastisitas UKT terhadap UMP dan pengeluaran per kapita bernilai negatif dan tidak signifikan, dan selang kepercayaannya

CC BY NC SA

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

tidak mencakup 1. Ini konsisten dengan dasar penetapan UKT, yaitu biaya kuliah tunggal per program studi dalam kerangka standar satuan biaya operasional nasional, bukan daya bayar setempat (Nancy, 2024). Akibatnya, beban UKT bergantung pada letak kampus. PTN di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta seperti UNNES, UNS, UNSOED, dan UGM memungut UKT tertinggi yang hampir sama dengan PTN di Kalimantan Timur atau Bali, tetapi di provinsi dengan UMP dan pengeluaran per kapita yang lebih rendah. Liu et al. (2021) juga menemukan bahwa keterjangkauan biaya kuliah di Tiongkok berbeda tajam antarwilayah, antara perkotaan dan perdesaan, dan antarkelompok pendapatan, meskipun tarifnya diatur pemerintah.

Temuan ketiga bersifat metodologis: kesimpulan tentang ketimpangan beban antarwilayah bergantung pada tolok ukur. Dengan UMP, PTN di Jawa tampak jauh lebih mahal. Dengan UMK kota tempat kampus berada, selisih itu hilang, karena UMP di Jawa adalah upah lantai yang jauh di bawah upah di kota besar seperti Surabaya, Depok, dan Bandung. Pertanyaannya adalah tolok ukur mana yang tepat. Bila pertanyaannya adalah beban bagi keluarga calon mahasiswa, tolok ukur yang tepat adalah daerah asal mahasiswa, bukan daerah kampus. Mahasiswa PTN besar di Jawa berasal dari seluruh provinsi, termasuk kabupaten berupah rendah. Dalam arti itu, UMP dan pengeluaran per kapita provinsi lebih dekat dengan kondisi rata-rata keluarga daripada UMK kota metropolitan, tetapi keduanya tetap hanya proksi.

Ketidakselarasan UMP dan pengeluaran per kapita juga perlu diperhatikan. Di Aceh dan Sulawesi Selatan, UMP sekitar 2,7 kali pengeluaran per kapita, sedangkan di DI Yogyakarta dan Jawa Barat hanya sekitar 1,2–1,3 kali. Perbedaan ini menunjukkan bahwa UMP bukan ukuran daya bayar rumah tangga yang seragam: UMP adalah upah minimum bagi pekerja formal dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan pengeluaran per kapita mencerminkan seluruh rumah tangga, termasuk pekerja informal dan rumah tangga tanpa pekerja upahan. Karena itu, laporan keterjangkauan sebaiknya tidak bergantung pada satu tolok ukur.

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, UKT tertinggi hanya mewakili ujung atas sebaran tarif dan biasanya berlaku untuk program kedokteran, sehingga indikator ini tidak menggambarkan beban mahasiswa pada umumnya. Ukuran yang lebih tepat adalah UKT rata-rata tertimbang menurut jumlah mahasiswa di setiap kelompok, yang tidak tersedia secara terbuka. Kedua, data UKT bersifat sekunder dan tidak seragam antarsumber, dan dua dari sepuluh PTN yang dapat diperiksa memiliki angka yang berbeda jauh. Ketiga, data pengeluaran per kapita diambil dari sajian ulang Databoks karena laman BPS tidak dapat diakses, sehingga perlu dicocokkan dengan tabel BPS sebelum naskah dikirim. Keempat, pengeluaran per kapita adalah rata-rata yang tertarik ke atas oleh rumah tangga kaya, dan tidak menggambarkan rumah tangga di kuintil bawah. Kelima, studi ini tidak memperhitungkan biaya hidup, iuran pengembangan institusi pada jalur mandiri, dan bantuan seperti KIP Kuliah. Keenam, sampel 20 PTN dipilih dari tabel media dan cenderung memuat PTN besar.

Implikasi kebijakannya adalah sebagai berikut. Pertama, PTN dan Kemendiktisaintek perlu menerbitkan sebaran mahasiswa per kelompok UKT, karena tanpa data itu keterjangkauan sistem UKT tidak dapat dinilai. Kedua, kriteria penempatan kelompok UKT sebaiknya memakai tolok ukur daya bayar yang memperhitungkan daerah asal, misalnya pendapatan atau pengeluaran keluarga relatif terhadap garis kemiskinan atau UMP provinsi asal mahasiswa. Ketiga, ambang keterjangkauan yang eksplisit, misalnya batas persentase UKT terhadap pendapatan keluarga, dapat membantu PTN menetapkan kelompok tengah secara lebih konsisten. Studi lanjutan dapat menggabungkan data UKT per kelompok dengan data Susenas menurut kuintil pengeluaran untuk menghitung porsi rumah tangga yang mampu membayar setiap kelompok UKT.

CC BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.281

KESIMPULAN

Pada 20 PTN jalur SNBP 2024, satu kali UKT kelompok tertinggi setara median 9,0 bulan UMP dan 15,1 bulan pengeluaran per kapita provinsi, dan pada 16 PTN melebihi UMP satu semester penuh. Besaran UKT tidak mengikuti daya bayar daerah, sehingga bebannya relatif lebih berat di provinsi berupah rendah, terutama di Jawa bila diukur dengan UMP. Selisih itu hilang bila UMK kota kampus dipakai, sehingga tolok ukur perlu dipilih dan dilaporkan dengan jelas. UKT kelompok 1 dan 2 hanya setara 2–8% UMP satu semester. Dengan demikian, keterjangkauan sistem UKT lebih bergantung pada ketepatan penempatan kelompok dan ketersediaan kelompok rendah daripada pada tarif tertinggi. Kesimpulan ini bersifat deskriptif dan perlu diuji dengan data sebaran mahasiswa per kelompok UKT dan data pengeluaran menurut kuintil.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data dan skrip analisis tersedia sebagai berkas pendamping: ukt_lokasi_ptn_2024.csv (UKT dan lokasi kampus), data_provinsi_2024.csv (UMP dan pengeluaran per kapita provinsi), data_kabkota_2024.csv (UMK dan pengeluaran per kapita kabupaten/kota), hasil_rasio_per_ptn.csv, hasil_analisis.txt, dan analisis_ukt_ump.py. Angka UKT, UMP, dan pengeluaran per kapita berasal dari sumber sekunder dan perlu dicocokkan dengan laman UKT resmi PTN, surat keputusan gubernur, dan tabel BPS sebelum naskah dikirim.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). Ringkasan eksekutif pengeluaran dan konsumsi penduduk Indonesia Maret 2024 (Katalog 3201013). Badan Pusat Statistik.

Barr, N. (2004). Higher education funding. Oxford Review of Economic Policy, 20(2), 264–283. https://doi.org/10.1093/oxrep/grh015

Cermati. (2024, 11 Juni). Daftar lengkap UMK dan UMR Sulawesi Selatan 2024. https://www.cermati.com/artikel/umr-sulawesi-selatan

Darmawan, A. D. (2026). Pengeluaran per kapita [provinsi dan kabupaten/kota] 2025 [Serangkaian laman statistik]. Databoks, Katadata. https://databoks.katadata.co.id (daftar laman pada Tabel L1)

Dealls. (tanpa tahun). UKT dan biaya kuliah Unsoed. https://dealls.com/pengembangan-karir/ukt-unsoed

Dynarski, S. M. (2003). Does aid matter? Measuring the effect of student aid on college attendance and completion. American Economic Review, 93(1), 279–288. https://doi.org/10.1257/000282803321455287

Fadhil, I., & Sabic-El-Rayess, A. (2021). Providing equity of access to higher education in Indonesia: A policy evaluation. Indonesian Journal on Learning and Advanced Education, 3(1), 57–75. https://doi.org/10.23917/ijolae.v3i1.10376

Heller, D. E. (1997). Student price response in higher education: An update to Leslie and Brinkman. The Journal of Higher Education, 68(6), 624–659. https://doi.org/10.1080/00221546.1997.11779004

Hill, C. B., Winston, G. C., & Boyd, S. A. (2005). Affordability: Family incomes and net prices at highly selective private colleges and universities. Journal of Human Resources, 40(4), 769–790. https://doi.org/10.3368/jhr.xl.4.769

Johnstone, D. B. (2004). The economics and politics of cost sharing in higher education: Comparative perspectives. Economics of Education Review, 23(4), 403–410. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2003.09.004

Liu, S., Wang, E., & Wang, X. (2021). Changes in the affordability of 4-year

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

public higher education in China during massification. Asia Pacific Education Review, 22(2), 273–289. https://doi.org/10.1007/s12564-020-09666-6

Long, J. S., & Ervin, L. H. (2000). Using heteroscedasticity consistent standard errors in the linear regression model. The American Statistician, 54(3), 217–224. https://doi.org/10.1080/00031305.2000.10474549

Marcucci, P. N., & Johnstone, D. B. (2007). Tuition fee policies in a comparative perspective: Theoretical and political rationales. Journal of Higher Education Policy and Management, 29(1), 25–40. https://doi.org/10.1080/13600800600980015

Nancy, Y. (2024). Berapa biaya UKT terendah dan tertinggi tahun 2024? Tirto.id. https://tirto.id/berapa-biaya-ukt-terendah-dan-tertinggi-tahun-2024-gYVc

Nurdifa, A. R. (2024, 2 Januari). Daftar lengkap UMP 2024 di 38 provinsi, berlaku mulai 1 Januari 2024. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20240102/12/1728810/daftar-lengkap-ump-2024-di-38-provinsi-berlaku-mulai-1-januari-2024

Ogawa, K., & Iimura, K. (2010). Determinants of access and equity in tertiary education: The case of Indonesia. Excellence in Higher Education, 1, 3–22. https://doi.org/10.5195/ehe.2010.12

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024).

Prayoga, J. (2023, 19 Desember). Daftar UMK di Indonesia 2024. Fortune Indonesia. https://www.fortuneidn.com/news/daftar-umk-di-indonesia-2024-00-smfbh-fdsmjd

Purnastuti, L., & Izzaty, R. E. (2016). Access and equity in higher education in Indonesia. Dalam M. Shah, A. Bennett, & E. Southgate (Ed.), Widening higher education participation: A global perspective (hlm. 119–134). Chandos Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100213-1.00008-1

Santika, E. F. (2023, 28 November). Kenaikan UMP 2024 di Indonesia: Daftar lengkap 38 provinsi. Databoks, Katadata. https://databoks.katadata.co.id/en/employment/statistics/6378b5f5108db99/2024-provincial-minimum-wage-ump-increase-in-indonesia-a-complete-list-of-all-38-provinces

Setiawan, E. B. (2024). Rekonstruksi kebijakan hukum kenaikan uang kuliah tunggal berdasarkan tanggung jawab konstitusional negara. Lex Renaissance, 9(2), 394–422. https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art7

Yulianti, C. (2024, 22 Mei). Besaran UKT kedokteran di berbagai PTN tahun 2024, kampus mana UKT tertinggi? detikEdu. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7353631/besaran-ukt-kedokteran-di-berbagai-ptn-tahun-2024-kampus-mana-ukt-tertinggi

Yulianti, C. (2025, 5 Maret). Besaran UKT UI untuk jalur SNBP dan SNBT, cek prodi tujuanmu. detikEdu. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7807695/besaran-ukt-ui-untuk-jalur-snbp-dan-snbt-cek-prodi-tujuanmu

Lampiran. Sumber data pengeluaran per kapita

Tabel L1. Pengeluaran per kapita sebulan 2024 (Susenas) dan laman sumber

Wilayah	Pengeluaran per	Laman sumber (Darmawan, 2026)

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.281

	kapita sebulan 2024 (Rp)	
Aceh	1.264.733	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/fc083bb6e170602/pengeluaran-per-kapita-aceh
Riau	1.563.165	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/78147c0934ea8cf/pengeluaran-per-kapita-riau
Jawa Barat	1.633.032	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/109da92bc973119/pengeluaran-per-kapita-jawa-barat
Jawa Tengah	1.271.678	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/804c1aadc03689a/pengeluaran-per-kapita-jawa-tengah
DI Yogyakarta	1.758.865	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/15ebc837164475d/pengeluaran-per-kapita-di-yogyakarta
Jawa Timur	1.356.943	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/4bf8ab3397fcaa2/pengeluaran-per-kapita-jawa-timur
Bali	1.872.760	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/35646fe3f1a5c93/pengeluaran-per-kapita-bali
Kalimantan Timur	2.042.791	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/9fca1d72d292c91/pengeluaran-per-kapita-kalimantan-timur
Sulawesi Selatan	1.283.081	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/992a7cdfcb715ac/pengeluaran-per-kapita-sulawesi-selatan
Kota Surakarta	1.914.552	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/792a97f49a95296/pengeluaran-per-kapita-kota-surakarta
Kota Pekanbaru	2.342.634	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/80c9105066b0f49/pengeluaran-per-kapita-kota-pekanbaru
Kota Surabaya	2.834.267	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/ebde40049c0034f/pengeluaran-per-kapita-kota-surabaya
Kabupaten Sleman	2.805.553	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/c581f198ea18d38/pengeluaran-per-kapita-kabupaten-sleman
Kota Bandung	2.636.944	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/d99778ee6b745a2/pengeluaran-per-kapita-kota-bandung
Kabupaten Bogor	1.438.214	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/7c33edb47f2c69a/pengeluaran-per-kapita-kabupaten-bogor
Kota Malang	2.199.652	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/bafe45d5b92323f/pengeluaran-per-kapita-kota-malang
Kota Banda Aceh	2.671.363	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/967b387b3eb9a1d/pengeluaran-per-kapita-kota-banda-aceh
Kota Depok	3.021.242	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/d30d89ead35e420/pengeluaran-per-kapita-kota-depok
Kota Maka	1.963.517	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

ssar		kesehatan/statistik/b03962dfc1488ba/pengeluaran-per-kapita-kota-makassar
Kota Semarang	2.475.647	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/2023c79f4bab959/pengeluaran-per-kapita-kota-semarang
Kabupaten Badung	2.784.529	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/125630e08c1357c/pengeluaran-per-kapita-kabupaten-badung
Kota Samarinda	2.517.385	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/2847daf2f4db704/pengeluaran-per-kapita-kota-samarinda
Kabupaten Banyumas	1.465.175	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/a264fbf4e6dc0c1/pengeluaran-per-kapita-kabupaten-banyumas
Kabupaten Sumedang	1.436.685	https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/3fdf175015890eb/pengeluaran-per-kapita-kabupaten-sumedang

Catatan: setiap laman menyajikan nilai 2024 dan 2025 dari Susenas BPS; nilai 2024 yang dipakai. Laman diakses 1 November 2026.

CC BY NC SA